

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan (Ismuningsih, 2011). Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian khusus bagi seluruh negara (Lestari & Busnetty, 2022). Menurut Yacoub (2013), kemiskinan menjadi permasalahan mendasar yang sulit diselesaikan. Kondisi ini terjadi karena kurangnya akses untuk memenuhi kebutuhan pokok meliputi pangan, pakaian, pendidikan serta kesehatan (Kadji, 2012).

Selain itu, fenomena kemiskinan muncul karena permasalahan yang kompleks, artinya hal ini terjadi tidak hanya karena satu faktor, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor yang melatar belakangi (Parwa & Yasa, 2019). Banyaknya faktor penyebab kemiskinan yang ada membuat banyaknya pula usaha global yang terus dimutakhirkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Rencana global dalam pengentasan kemiskinan telah disepakati oleh seluruh pimpinan negara di dunia, yang dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs).

SDGs merupakan program pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memonitor tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan terlaksananya tata kelola sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dari

satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, SDGs memiliki 17 tujuan dengan urutan pertama dari tujuan tersebut adalah masyarakat tanpa kemiskinan.<sup>1</sup>

Pengentasan kemiskinan dan terciptanya kesejahteraan merupakan tujuan akhir bagi setiap negara, khususnya di negara berkembang (Pratama, 2014). Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang belum berhasil mengentaskan permasalahan kemiskinan. Di Indonesia, tercatat sebanyak 26,36 juta orang berada dibawah angka kemiskinan.<sup>2</sup> Pengukuran angka kemiskinan tersebut dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, yakni kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan yang diukur melalui sisi pengeluaran. Besaran pendapatan untuk mengetahui negara tersebut termasuk miskin atau tidak adalah dengan melihat pendapatan per kapita masyarakatnya, yakni dengan batas minimal sebesar Rp 505.469,00 per kapita per bulan.<sup>3</sup>

Fenomena kemiskinan muncul di seluruh kepulauan Indonesia, seperti di Pulau Jawa yang memiliki penduduk terbanyak menjadi penyumbang angka kemiskinan tertinggi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian PPN/BAPPENAS

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, 2022.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, 2022.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, 2022.

**Tabel 1.1**  
**Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau Tahun 2022**

Pulau	Presentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)		
	Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total
Sumatera	8,25	10,48	9,47	2,25	3,51	5,76
Jawa	7,65	11,94	9,03	8,03	5,91	13,94
Bali dan Nusa Tenggara	8,71	17,80	13,46	0,65	1,45	2,10
Kalimantan	4,70	7,07	5,90	0,39	0,60	0,99
Sulawesi	5,88	13,08	10,06	0,50	1,53	2,03
Maluku dan Papua	6,00	27,62	20,10	0,16	1,38	1,54
Indonesia	7,53	12,36	9,57	11,98	14,38	26,36

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Tabel 1.1 menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada tahun 2022. Pulau Kalimantan memiliki persentase penduduk miskin paling rendah, yakni sebesar 5,90%. Sementara itu, Pulau Maluku dan Papua memiliki persentase penduduk miskin terbesar, yakni sebesar 20,10%. Total penduduk miskin Indonesia berjumlah 26,36 juta orang yang terbagi dari penduduk kota berjumlah 11,98 juta orang dan penduduk miskin desa berjumlah 14,38 juta orang. Dari jumlah tersebut, 13,94 juta penduduk miskin berada di Pulau Jawa.

Penduduk miskin yang tinggi didominasi oleh Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebesar 74,45% terutama di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera (Sangadah *et al.*, 2020). Tingginya jumlah penduduk miskin di kedua pulau tersebut merupakan hal wajar karena lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di kedua pulau tersebut. Angka kemiskinan yang tinggi serta padatnya populasi pada wilayah tersebut mendorong pemerintah untuk semakin gencar dalam mengatasi kemiskinan. Salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Indonesia untuk dapat

mengurangi populasi dan menekan angka kemiskinan dilakukan dengan menerapkan kebijakan program migrasi penduduk.<sup>5</sup>

Migrasi merupakan aktivitas perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan menetap dalam jangka waktu tertentu.<sup>6</sup> Migrasi terjadi karena adanya ketidakpuasan atau kurangnya kebutuhan penduduk dari tempat asal, sehingga berpindah ke daerah lainnya (Pradana *et al.*, 2021). Faktor yang mendukung terjadinya migrasi yakni adanya keanekaragaman kondisi dan potensi antar wilayah di Indonesia (Hersahanty, 2020). Program migrasi yang digagas sejalan dengan penelitian Yulianti (2018) bahwa angka kemiskinan dapat ditekan dengan melakukan migrasi sebab migrasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang berbanding lurus dengan meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan.

Aktivitas migrasi selaras dengan dalil dalam kitab suci Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk ayat 15. Ayat ini menyatakan perintah dari Allah bahwa rezeki dapat dicari di segala penjuru bumi. Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S. al-Mulk [67]: 15).

Program migrasi yang diusung pemerintah telah dilaksanakan sejak tahun 1950. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta kepadatan

---

<sup>5</sup> Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2019.

<sup>6</sup> Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2019.

penduduk yang telah terjadi di Pulau Jawa.<sup>7</sup> Misi yang dibawa oleh program ini adalah memberikan kesempatan bagi penduduk yang ingin bekerja serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja di daerah lain, seperti pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan Papua. Dampak jangka Panjang pelaksanaan transmigrasi diharapkan mampu menjadi salah satu solusi pemerataan penduduk yang merujuk pada pengentasan kemiskinan. Jumlah migran sebagai hasil dari program transmigrasi hingga tahun 2019 tercatat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Migran di Indonesia 2019**

No	Provinsi	Seumur Hidup	Risen
1	Aceh	232.693	47.119
2	Sumatera Utara	586.721	196.013
3	Sumatera Barat	405.024	176.914
4	Riau	1.998.658	175.668
5	Jambi	688.349	51.408
6	Sumatera Selatan	974.161	100.475
7	Bengkulu	372.758	44.068
8	Lampung	1.402.046	115.286
9	Kep. Bangka Belitung	218.732	31.177
10	Kepulauan Riau	1.010.257	190.782
11	DKI Jakarta	3.745.690	466.476
12	Jawa Barat	5.698.359	894.530
13	Jawa Tengah	1.143.288	690.216
14	DI Yogyakarta	686.699	264.645
15	Jawa Timur	1.064.004	450.753
16	Banten	2.898.000	307.005
17	Bali	478.193	123.287
18	Nusa Tenggara Barat	138.284	121.322
19	Nusa Tenggara Timur	190.887	90.218
20	Kalimantan Barat	288.219	28.876
21	Kalimantan Tengah	586.253	63.234
22	Kalimantan Selatan	519.467	88.168
23	Kalimantan Timur	1.232.356	136.804
24	Kalimantan Utara	264.477	34.819
25	Sulawesi Utara	209.210	38.584
26	Sulawesi Tengah	481.187	49.990
27	Sulawesi Selatan	402.000	173.257
28	Sulawesi Tenggara	461.531	57.146
29	Gorontalo	83.545	22.368

<sup>7</sup> Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2019.

30	Sulawesi Barat	191.357	41.906
31	Maluku	157.436	35.498
32	Maluku Utara	123.650	19.771
33	Papua Barat	301.820	43.807
34	Papua	546.443	68.882
35	Indonesia	29.781.754	5.440.472

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2019

Pada tahun 2019, jumlah migran di Indonesia telah mencapai 35,3 juta orang, yakni terbagi menjadi migran seumur hidup (29,8 juta orang) dan migran risen<sup>8</sup> (5,4 juta orang). Dominasi jumlah penduduk migran berasal dari Pulau Jawa, yaitu migran seumur hidup sekitar 51,2% dan migran risen sebesar 56,5%. Sementara, jumlah migran seumur hidup terkecil berasal dari Provinsi Gorontalo (83.545 orang) dan jumlah migran risen terkecil berasal dari Provinsi Maluku Utara (19.771 orang).

Dalam penerapannya, migrasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari migrasi dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga (Wafirotin, 2016). Tenaga kerja yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan di daerah asal akan mendapatkan kesempatan kerja. Dengan begitu, migrasi dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan yang berpengaruh pada penyusutan angka kemiskinan. Namun, hal ini akan berdampak negatif pada kesejahteraan daerah asal apabila terlalu banyak tenaga kerja produktif yang bermigrasi (Padli, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, kemiskinan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menggagas berbagai macam upaya pengentasan kemiskinan di mana salah satunya adalah program migrasi. Sebagai

---

<sup>8</sup> Migran risen yaitu penduduk yang provinsi tempat tinggal 5 tahun lalu berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang.

rencana strategis menekan angka kemiskinan yang dipilih, peneliti tertarik pada hasil aktivitas migrasi yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, peneliti mengambil judul “**Analisis Pengaruh Migrasi terhadap Kemiskinan di Indonesia**”.

Adapun. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada ruang lingkup atau cakupan data dan variabel. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian mengenai faktor pengaruh migrasi terhadap kemiskinan di Indonesia dalam lingkup provinsi. Nabila & Pardede (2014) mengemukakan bahwa peluang orang miskin untuk bermigrasi lebih kecil dibandingkan yang tidak miskin. Namun, untuk individu di perkotaan, ditemukan bahwa peluang orang miskin untuk bermigrasi dari perkotaan ke perkotaan lebih besar dibanding yang tidak miskin. Sementara menurut Kousar *et al.* (2016), migrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di kalangan rumah tangga pedesaan. Peneliti juga menambahkan variabel kontrol yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan, yakni upah, Pendidikan, dan wilayah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pengaruh migrasi masuk terhadap angka kemiskinan di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh migrasi keluar terhadap angka kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh upah terhadap angka kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap angka kemiskinan di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh wilayah terhadap angka kemiskinan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis pengaruh migrasi masuk terhadap angka kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh migrasi keluar terhadap angka kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh upah terhadap angka kemiskinan di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap angka kemiskinan di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh wilayah terhadap angka kemiskinan di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memperkaya literatur bacaan mengenai peran migrasi terhadap angka kemiskinan di Indonesia dalam lingkup provinsi.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.